
POTENSI PENGEMBANGAN EKONOMI DI KABUPATEN ROKAN HULU

oleh :

*) Ikhsan Gunawan

*) Hamdi Sari Maryoni

**) Universitas Pasir Pengaraian

email: hamdiyoni@yahoo.co.id

Abstrak

Program ekonomi berkelanjutan merupakan penjabaran dari UUD'45 untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif prekonomian wilayah berbasis sumber daya alam yang dimiliki, sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten, penyediaan infrastruktur, dan meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara berkelanjutan. Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mengandung makna bahwa haruslah mempertimbangkan keunggulan pada aspek sumber-sumber daya ekonomi dan lokasi yang strategis dalam konteks perekonomian nasional dan global.

Kata Kunci : Kebijakan, Program Ekonomi, dan KEK

Pendahuluan

Pemerintah berusaha menjalankan amanah yang termatup dalam Undang-undang Dasar 1945. Aplikasi kebijakan yang direncanakan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang merupakan visi dan misi dimasa yang akan datang. Semua kebijakan tersebut saling berkaitan antara jangka pendek hingga jangka panjang yang kemungkinan dapat tercapai pada tahun 2025. Menciptakan kondisi Indonesia menjadi negara maju masyarakat adil makmur dan sejahtera merupakan visi dan misi Pemerintahan saat ini.

Program “Nawacita” merupakan slogan yang dibumungkan oleh pemerintah saat ini. Menciptakan kondisi perekonomian “Tanah Air” yang berkelanjutan dengan transformasi fundamental ekonomi dan mengubah paradigma pembangunan dari yang bersifat konsumtif keproduktif. Ini dapat diartikan bahwa pemerintah menginginkan semua komponen dan sektor saling mendukung demi menciptakan kondisi ekonomi lebih memiliki inovasi yang lebih kreatif. Kondisi keamanan yang kondusif, aman dan tentram diharapkan dapat mendukung dan berpartisipasi didalamnya.

Melihat tujuan dari pembangunan pemerintah yang secara umum memiliki arti untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kontribusi semua sektor yang terkait, seperti sektor keamanan, ekonomi, pertanian, perikanan, dan industri. Terkait dengan hal tersebut, semua sektor tidak ada yang mendominasi tetapi saling melengkapi. Visi dan misi dari program ekonomi untuk

mensejahterakan rakyatlah yang harus diperhatikan. Sehingga antara sektor memiliki keterkaitan dan tidak bisa terlepas dalam membangunnya (WiludjengRoessali, 2015:16).

Selanjutnya, percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif prekonomian wilayah berbasis sumber daya alam yang dimiliki, sumber daya manusia yang berkualitas&berkompeten, penyediaan infrastruktur, dan meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara berkelanjutan. Menjabarkan kebijakan pemerintah tersebut maka dikeluarkanlah Paket VI kebijakan ekonomi. Kebijakan yang dirilis tanggal 5 November 2015 oleh Mentri Koordinator Prekonomian di Istana Kepresidenan dengan 3 kebijakan deregulasi adalah sebagai berikut; upaya mengerakkan Prekonomian Di Wilayah Pinggiran Melalui Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus(KEK); penyediaan Air Untuk Masyarakat Secara Berkelanjutan dan Berkeadilan; dan, proses Cepat (paperless) Perizinan Impor Bahan Baku Obat.Sangatmenarik yang akan dibahas dalam analisis ini adalah upaya penetapan dan mengerakkan prekonomian di wilayah pinggiran melalui KEK (Kawasan Ekonomi Khusus). Kebijakan ini dilandasi oleh UU no.39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang bunyinya bertujuan untuk menciptakan kawasan-kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi(*foreign direct investment*)dan sebagai penggerak perekonomian di wilayah-wilayah yang selama ini belum berkembang. Antara lain ini akibat belum ditetapkannya insentif dan kemudahan investasi di KEK.

Sejarah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Luar Negeri

Tumbuhnya kawasan industri dimulai pada abad ke-19, yaitu dimulai pada tahun 1887. Pada tahun itu kawasan industry di Inggris, yaitu *Trafford park estate* dengan luas sekitar 500 ha yang merupakan kawasan industry terluas sampai tahun 1950-an. Selanjutnya pada awal abad 20, di Amerika Serikat, dikembangkan kawasan industry di kota Chicago antar lain *central manufacturing district* yang dibangun pada tahun 1909 seluas 215 ha dan *the pershing road district* yang dibangun pada tahun 1910 dengan luas 40 ha. (Mulyadi dan Monstiska, majalah kawasan (2011: 1) dalam Maramis (2013)).

Selanjutnya, perkembangan KEK menular ke Negara Amerika Serikat. Pada mulanya pada tahun 1960-an telah berkembang kawasan industry yang dengan nama *science park* atau *technology park* yaitu kawasan industry untuk tujuan penelitian dan pengembangan. Terus berkembang dengan konsep *business park* dimana dalam suatu kawasan terdapat berbagai kegiatan seperti perkantoran dan industry yang ditunjang oleh kegiatan perdagangan dan rekreasi yaitu sekitar tahun 1970-an. Kawasan *business park* pada tahun 1980-an masuk

didalamnya kawasan perumahan untuk memperlancar efektifitas dan efisiensi. Namun penggunaan istilah KEK (SEZ, *special economic zone*) baru lahir dipertengahan abad ke 20 (Mulyadi dan Monstiska, majalah kawasan (2011: 1-2) dalam Maramis (2013)).

Selanjutnya, dengan berjalanya waktu penyebutan istilah KEK atau *special economic zone* (SEZ) sebagai suatu *industrial park* diperkenalkan di Puerto Rico di tahun 1947. KEK saat itu dibangun dengan tujuan menangkap peluang investasi dari daratan Amerika Serikat (Kumar, 2008) dalam Maramis (2013)). Konsep ini kemudian diadopsi oleh Irlandia dan Taiwan pada tahun 1960-an. Namun negeri Cina-lah yang membuat KEK menjadi terkenal di seluruh dunia, yang berawal di kota Shenzhen. Banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan KEK sebagai suatu kawasan. Hal ini sangat masuk akal karena KEK, bukanlah konsep baru. KEK berkembang dari kawasan industri yang telah ada jauh sebelum konsep KEK dikenal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya negara yang awalnya memiliki kawasan industri kemudian merubahnya menjadi KEK. Menurut *Knowledge Innovation Zone Research Report* tahun 2006, konsep *Special economic zones* (SEZ), memiliki banyak sinonim (alternatif konsep) antara lain : *Free Economic Zones, Free Trade Zones, Enterprise Free Zones, Enterprise Trade Zones, Export Processing Zones, Free Ports, Foreign Trade Zones, New Export Distribution Centers dan Regional Foreign Trade Zones*. Sebagai contoh ; di India, awalnya kawasan industri yang ada disebut *Export Processing Zones (EPZ)* atau zona pemrosesan export, yang telah ada sejak tahun 1965. Namun kemudian ada delapan EPZ dikonversi menjadi KEK, ditahun 2000. (Kumar, 2008) dalam Maramis (2013).

Perkembangan KEK di luar negeri di akhir abad ke 20 dan awal abad ke-21, mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari sisi jumlah. Menurut Kumar (2008), KEK mengalami *booming* pada tahun 1995 yaitu terdapat 500 buah KEK di 73 negara, namun pada tahun 2002 bertambah menjadi sekitar 3.000 buah di 120 negara, yang menghasilkan US\$ 600 billion ekspor dan menyerap 50 juta pekerja. Yang diakhir tahun 1990-an hanya ada 80 buah KEK di 30 negara, yang menghasilkan US\$ 6 billion (milyar) ekspor dan mempekerjakan sekitar 1 juta tenaga kerja. Ini menunjukkan bahwa KEK telah berkembang dalam lingkup negara dan bahkan dalam lingkup global, saat ini.

Salah satu hal yang memicu perkembangan KEK yang fantastis belakangan ini adalah adanya globalisasi ekonomi. Yang diiringi dengan masuknya FDI (foreign direct investment), khususnya dari negara maju ke negara negara industri baru seperti Taiwan dan China, diawal tahun 1990-an (Maramis,2013).

Fungsi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Menurut UU 39/2009, pasal 1, Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

KEK dengan fungsi perekonomian, mengandung makna bahwa pembentukan KEK haruslah mempertimbangkan keunggulan pada aspek sumber-sumber daya ekonomi dan lokasi yang strategis dalam konteks perekonomian nasional dan global. Artinya keberadaan KEK haruslah menjadi basis perdagangan Internasional bagi daerah yang akan dibentuk KEK. Dengan harapan KEK dapat memicu terjadinya percepatan ekonomi di wilayah /daerah dimana KEK berada secara khusus dan memicu terjadinya percepatan ekonomi secara nasional. Untuk itu pada UU 39/2009, pasal 2, dikatakan bahwa KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis. Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

Kombinasi faktor geoekonomi dan geostrategi yang baik, akan memberikan dampak keberlanjutan atas existing KEK di masa depan. Menurut penjelasan UU 39/2009, yang dimaksud dengan “geoekonomi” adalah kombinasi factor ekonomi dan geografi dalam perdagangan internasional. Sedangkan “geostrategi” adalah kombinasi factor geopolitik (pengaruh faktor geografi, ekonomi, dan demografi dalam politik luar negeri suatu negara) dan strategi yang memberikan peran tertentu pada suatu kawasan geografis.

Pembentukan KEK, didasari pada konsep cluster, atau zoning. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena bersifat zoning maka dibutuhkan peraturan untuk mengaturnya. Menurut penjelasan UU 39/2009, Yang dimaksudkan dengan “peraturan zonasi” adalah ketentuan yang mengatur

persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Zona peruntukkan yang penetapan Zonanya dilakukan dengan rencana rinci tata ruang. Menurut UU 39/2009, pasal 3, bahwa aspek zoning dalam KEK dapat diklasifikasikan menjadi 7 (tujuh) zona, yaitu:

- a. Pengolahan ekspor,
- b. Logistik,
- c. Industri,
- d. Pengembangan teknologi,
- e. Pariwisata,
- f. Energi, dan/atau
- g. Ekonomi lain.

KEK dapat terdiri atas satu atau beberapa Zona, didalam kawasan KEK, harus ada fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. Dan di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskritifkan fenomena yang terjadi dengan merujuk beberapa literatur penelitian yang berkaitan dan memberikan informasi secara rinci tentang kondisi Kabupaten Rokan Hulu. Strategi ini merupakan masukan bagi penetapan Kebijakan Pemerintah Pusat untuk menjadi rekomendasi dan evaluasi yang tepat dalam menuntukan daerah Rokan Hulu menjadi salah satu kawasan KEK.

Data dan fakta

Pemerintah mencanangkan untuk mengembangkan 7 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berada diluar Jawa, dan 12 Kawasan Industri dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Tabel.1
Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia

Wilayah	2014	2015	2019
KEK di Luar Jawa	7	7	14
Kawasan Industri	N.A	12	14
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas(KPBPB)	4	4	4

Sumber: Rencana dan Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2016 (Bappenas,2015)

Strategis Pengembangan wilayah dengan arah kebijakan tersebut merupakan percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Strategi wilayah tersebut terutama di Sumatera, Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Terutama memaksimalkan sumber daya yang dimiliki mulaidari; aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah yang selaras serta peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Berikut strategi kebijakannya:

Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah : Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, baik yang telah ada maupun yang baru di luar Pulau Jawa sesuai dengan potensi unggulan tiap wilayah.

Percepatan Pembangunan Konektivitas : (a) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui *intermodal supply chained system*; (b) memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (*hinterland*); serta (c) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan.

Potensi Wilayah Kabupaten Rokan Hulu

Perwujudan pengembangan pusat kegiatan di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan karakteristik sumberdaya alam, wilayah Kabupaten Rokan Hulu menjadi 5 kategori sub wilayah, yaitu:

Kawasan Budaya Perkebunan

Tanaman perkebunan merupakan salah satu primadona komoditi perdagangan di Kabupaten Rokan Hulu antara lain karet, kelapa sawit, kelapa, kopi dan lain-lain. Pada tahun 2013 luas areal tanaman perkebunan di Kabupaten Rokan Hulu seluas 266.071,51 ha. Dari luas areal tersebut seluas 56.447,20 ha (21,22%) lahan karet, 207.804,18 ha (78,10%) lahan kelapa sawit, 1.179,08 ha (0,44%) kelapa dan 628,71 ha (0,24%) lainnya. Meliputi hampir seluruh kecamatan dengan areal tanaman terluas yaitu Kecamatan Tambusai Utara dengan komoditi karet seluas 11.373 ha dan komoditi kelapa sawit seluas 66.150,07 ha.

Program pengembangan kawasan perkebunan yaitu; 1) pengembangan komoditi unggulan perkebunan yang terdiri atas kelapa sawit dan tanaman karet serta beberapa jenis tanaman tahunan lainnya seperti kelapa, gambir, enau dan kopi; 2) pengembangan komoditi perkebunan pada perkebunan rakyat dan perusahaan perkebunan besar (baik

swasta/pemerintah); 3) pengembangan sarana dan sarana pendukung kegiatan perkebunan; 4) pengembangan manajemen pengelolaan perkebunan yang telah terorganisir.

Tabel 2 Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan Tahun 2010-2013 di Kabupaten Rokan Hulu

No	Tanaman	Tahun				Pertumbuhan (%)
		2010	2011	2012	2013	
Luas Areal (Ha)						
1	Karet	53.630,14	53.630,14	56.990,00	56.447,20	4.93
2	Kelapa sawit	127.808,14	127.808,14	204.351,28	207.804,18	39.12
3	Kelapa	1.299,77	1.299,77	852,67	1.179,08	-24.75
4	Pinang	152,90	152,90	122,17	156,35	-3.29
5	Gambir	1.010,00	1.010,00	252,00	109,00	-431.99
6	Kopi	54,05	54,05	634,57	171,70	-178.10
7	Coklat	464,48	464,48	314,26	191,66	-111.77
Total Produksi (Ton)						
1	Karet	186.302,54	186.302,54	122.954,40	182.681,40	-18,83
2	Kelapa sawit	1.394.134,14	1.394.134,14	3.314.685,60	2.216.110,80	8,37
3	Kelapa	112.657,43	112.657,43	100.401,75	161.716,00	25,71
4	Pinang	220,87	220,87	793,80	404,16	-24,23
5	Gambir	288,00	288,00	100,00	24,48	-496,50
6	Kopi	17,70	17,70	152,00	110,76	51,12
7	Coklat	103,35	103,35	36,75	195,12	-100,06

Sumber: Rokan Hulu Dalam Angka 2009-2015

Kawasan Sentra Peternakan dan Perikanan

Meliputi hampir diseluruh wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu merupakan kabupaten yang mempunyai keunggulan komoditas ternak pada ternak sapi potong dengan nilai LQ sebesar 1,36. Kabupaten Rokan Hulu menargetkan produksi ikan 26.989 ton pada tahun 2014 untuk jenis ikan air tawar.

Program pengembangan perikanan yaitu (1) ektensifikasi penangkapan diperairan umum (rawa dan sungai) serta melalui budidaya keramba, kolam dan tambak; (2) pengembangan sentra budidaya perikanan jenis ikan mas, nila, bawal, patin baung dan gurami diwilayah dataran tinggi (Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Tandun, Kecamatan Kabun) dan wilayah dataran menengah (Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Pagaran Tapah dan Kecamatan Tambusai), ikan jenis baung dan patin di wilayah dataran rendah (Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan Kunto Darussalam); (3) pengembangan perikanan tangkap di perairan danau, meliputi Danau Sipogas (Kecamatan Rambah), Danau Ombak (Kecamatan Kunto Darussalam), Danau Baru (Kecamatan Kepenuhan), Danau Pomutuh (Kecamatan Bonai Darussalam); (4) pengembangan

pengelolaan Balai Benih Ikan di Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Rambah dan di Kecamatan Kepenuhan; (5) pengembangan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan kegiatan perikanan; (6) pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan perikanan yang lebih terorganisir.

Program pengembangan kawasan peternakan yaitu : 1) pengembangan peternakan potensial pada lokasi transmigrasi dan pusat-pusat pemukiman serta pada areal lahan kering pada kawasan perkebunan yang tersebar diperkotaan dan perdesaan, 2) pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan peternakan, 3) pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan peternakan yang lebih terorganisir.

**Tabel 3 Pertumbuhan Ternak dan Unggas
Tahun 2010-2013 di Kabupaten Rokan Hulu**

No	Ternak	Tahun				Pertumbuhan (%)
		2010	2011	2012	2013	
Populasi						
1	Sapi	17.492	18.548	25.249	26.057	2,65
2	Kerbau	2.298	2.330	2.453	2.498	2,92
3	Kambing	15.415	15.629	15.754	15.691	2,98
4	Babi	1.502	1.304	1.275	1.005	3,44
5	Ayam buras	1.747	2.324	3.105	3.492	2,39
6	Ayam pedaging	26.651	25.301	19.772	28.926	3,02
7	Ayam petelur	196.701	188.188	272.538	353.870	2,51
8	Itik	41.740	33.123	4.339	2.608	10,56

Sumber: Rokan Hulu Dalam Angka 2009-2014

Pada tahun 2013 jumlah ternak tercatat 26.057 ekor sapi, 2.498 ekor kerbau, 15.691 ekor kambing dan 1.005 ekor domba. Populasi unggas di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2013 tercatat 2.608 ekor ayam ras, 231.500 ekor ayam buras dan 22.797 ekor itik. Produksi perikanan di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2013 jumlah nilai produksi perikanan 52,38 persen dari perikanan air tawar, 46,42 persen dari kolam dan 1,20 persen dari keramba.

Kawasan Sentra Pertanian

Meliputi Kecamatan Rambah Samo dengan Ibukota Danau Sati. Kawasan ini merupakan daerah yang memiliki potensial perluasan areal persawahan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai swasembada beras tahun 2013 dengan memaksimalkan sentra produksi padi melalui pendekatan indeks pertanaman padi dari IP 100 menjadi IP 200 sampai IP 300 dan tidak menutup kemungkinan menjadi IP 400.

Tabel 4 Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman Tahun 2010-2013 di Kabupaten Rokan Hulu

No	Tanaman	Tahun				Pertumbuhan (%)
		2010	2011	2012	2013	
Luas Areal (Ha)						
1	Padi sawah	4.214	4.739	4.739	5.414	22,16
2	Padi ladang	12.056	10.734	10.734	10.386	16,06
3	Palawija	5.385	5.824	5.824	2.803,80	-92,06
Total Produksi (Ton)						
1	Padi sawah	19.133,31	24.524,55	24.524,55	24.784,79	22,80
2	Padi ladang	25.140,71	25.019,45	25.019,45	27.776,40	9,49
3	Palawija	15.092,78	18.053,13	18.053,13	13.138,77	-14,87

Sumber: Rokan Hulu Dalam Angka 2009-2014

Program pengembangan kawasan pertanian lahan basah yaitu : (a) penetapan kawasan pertanian lahan basah sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang perlu dilindungi dari alih fungsi lahan, (b) peningkatan produktivitas lahan padi sawah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, (c) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian lahan basah, (d) pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan pertanian lahan basah yang lebih terorganisir, (e) pengembangan dan perluasan kegiatan pertanian lahan kering dan hortikultura, (f) pengembangan manajemen pengelolaan kegiatan pertanian lahan kering dan hortikultura yang lebih terorganisir.

Pertanian tanaman pangan meliputi padi sawah, ladang, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan. Tahun 2013 luas panen padi sawah 5.414 ha dengan produksi sebesar 24.784,79 ton, sedangkan untuk padi ladang luas panen 10.386 ha dengan produksi 27.776,40 ton. Tiga kecamatan penghasil padi terbesar di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2013 adalah Kecamatan Rambah Samo 13.852,06 ton (3.378 ha), Kecamatan Bangun Purba 7.417,82 ton (2.208 ha) dan Kecamatan Rambah 7.121,78 ton (1.758 ha).

Pembahasan

Berdasarkan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Rokan Hulu pada masing-masing komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Rokan Hulu tersebut terdiri dari 11 komoditas unggulan pertanian secara berurutan yaitu: padi ladang, karet, ubi jalar, ayam kampung, itik, sapi, domba, ikan perairan umum, kedelai, kakao dan kopi.

Melihat komoditas pertanian yang menjadi komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari kelompok komoditas pertanian tanaman pangan yaitu padi ladang dan ubi jalar, tanaman palawija yaitu kedelai, tanaman perkebunan yaitu komoditas karet, kakao dan kopi selanjutnya adalah kelompok komoditas peternakan yaitu komoditas ayam

kampung, itik, sapi, domba, kemudian kelompok komoditas perikanan dimana perikanan perairan umum termasuk kategori tinggi.

Hasil identifikasi komoditas unggulan di Kabupaten Rokan Hulu dihasilkan 11 komoditas yang menjadi unggulan yaitu komoditas kelapa sawit, kelompok komoditas pertanian tanaman pangan yaitu padi ladang dengan nilai LQ sebesar 5,64 dan ubi jalar 1,80, tanaman palawija yaitu kedelai dengan nilai LQ 1,26, tanaman perkebunan yaitu komoditas karet dengan nilai LQ sebesar 4,97, kakao 1,11 dan kopi sebesar 1,08 selanjutnya adalah kelompok komoditas peternakan yaitu komoditas ayam kampung 1,67, itik 1,54, sapi 1,51, domba 1,37, kemudian kelompok komoditas perikanan perairan umum sebesar 1,29.

Tabel 5 Hasil Perhitungan *Location Quotient* Komoditi Pertanian Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014

No	Komoditi	<i>Location Quotient</i> (LQ)
1	Tanaman Pangan: 1. Padi sawah 2. Padi ladang 3. Jagung 4. Ubi Kayu 5. Ubi Jalar	 0,52 5,64 0,47 0,48 1,80
2	Palawija: 1. Kacang Tanah 2. Kedelai	 0,34 1,26
3	Perkebunan: 1. Karet 2. Kelapa 3. Kelapa Sawit 4. Kopi 5. Pinang 6. Kakao	 4,97 0,08 0,87 1,08 0,06 1,11
4	Peternakan: 1. Sapi 2. Kerbau 3. Kambing 4. Domba 5. Babi	 1,51 0,47 0,72 1,37 0,64
5	Perunggasan: 1. Ayam petelur 2. Ayam pedaging 3. Ayam kampung 4. Itik	 0,10 0,94 1,67 1,54
6	Perikanan: 1. Ikan perairan umum 2. Perikanan kolam/keramba	 1,29 0,88

Sumber : data olahan

Salah satu kriteria komoditas unggulan merupakan komoditas yang dapat bertahan dalam jangka panjang, mulai dari *fase* kelahiran, *fase* pertumbuhan hingga *fase* kejenuhan atau penurunan. Jika komoditas unggulan yang satu memasuki tahap kejenuhan atau penurunan maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya. Komoditas lain selain komoditas unggulan pertanian terpilih merupakan stok bagi Kabupaten Rokan Hulu untuk dikembangkan di masa mendatang dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.

Kabupaten Rokan Hulu terdapat berbagai komoditi dari sektor pertanian yang tergolong menjadi produk unggulan, produk andalan dan produk potensial. Produk unggulan merupakan produk yang mempunyai keunggulan baik dari sisi produksinya, kontinuitas dan daya saing sehingga diterima masyarakat dan dapat menarik investor.

Produk andalan adalah produk yang dapat diandalkan pada daerah tertentu karena banyak diusahakan oleh masyarakat setempat dan mempunyai prospek pasar yang cerah dan produk potensial adalah yang mempunyai peluang untuk dikembangkan dengan meningkatkan produksi dan daya saing.

Peranan dan kontribusi sektor pertanian dalam mendukung PDRB Kabupaten Rokan Hulu bisa menjadi basis utama dalam pengembangan KEK. Analisis *Location Quotient* merupakan perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri disuatu daerah terhadap peranan suatu sektor/industri tersebut secara nasional atau di suatu kabupaten terhadap peranan suatu sektor/industri secara regional atau tingkat provinsi. Jumlah produksi yang besar di suatu kabupaten bukan merupakan faktor utama menjadi komoditi unggulan jika dianalisis menggunakan metode *LQ* jika ternyata dibandingkan dengan tingkat provinsi nilainya kurang dari 1.

Perhitungan dengan metode *LQ* bisa menggambarkan dari 11 komoditas yang ada mempunyai nilai $LQ > 1$. Perbandingan komparatif ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan komoditas mana yang ditetapkan sebagai prioritas pengembangan di Kabupaten Rokan Hulu.

Sehingga Berdasarkan analisis *LQ* dan pertimbangan kecenderungan yang telah disebutkan sebelumnya komoditi unggulan yang diambil adalah komoditi karet, peternakan sapi dan perikanan darat. Ketiga komoditas tersebut diambil selain mempunyai nilai $LQ > 1$, oleh sebab itu sudah selayaknya Kabupaten ini bisa ditetapkan menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam pengembangan KEK.

Hasil paduserasi dengan pihak pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Rokan Hulu yang juga merupakan hasil analisis, selanjutnya direkomendasikan menjadi arahan kebijakan pengembangan komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Rokan Hulu, baik itu komoditas strategis maupun komoditas unggulan lainnya. Arahan kebijakan pengembangan komoditas unggulan pertanian bagi Kabupaten Rokan Hulu yaitu; pengembangan komoditas karet, pengembangan komoditas sapi, dan pengembangan komoditas ikan.

Kesimpulan

Potensi yang sangat strategi untuk dikembangkan menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi Kabupaten Rokan Hulu adalah sektor pertanian dengan beberapa komoditas. Komoditas unggulan tersebut menjadi sebuah kebijakan ekonomi yang merupakan obat dari kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Potensi sumber daya yang bisa dikembangkan dan menjadi ujung tombak pembangunan wilayah dari mulai sektor pertanian hingga sektor migas berusahadiramusebagaibagiandarisektor unggulan.

Dukungan pengembangan potensi wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Rokan Hulu bisa terlihat dalam analisis *Location Quontien*. Analisis *Location Quontien* merupakan perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri disuatu daerah terhadap peranan suatu sektor/industri tersebut secara nasional atau di suatu kabupaten terhadap peranan suatu sektor/industri secara regional atau tingkat provinsi.

Kebijakan yang diramu harus merangkum seluruh keinginan lapisan masyarakat. Selain sisi penawaran yang penting, sisi permintaan juga tidak boleh di kesampingkan. Penguatan sisi penawaran kurang efektif jika dari sisi permintaan lemah. Oleh karenanya, kebijakan yang terorganisir dan tersinergi serta dapat merangkum keinginan masyarakat sangat ditunggu guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang *sustainable* dimasa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

Alfonso W., 1999. Ketidakseimbangan Kota dan Daerah, Ekonomi Keuangan Indonesia Vol. XXVII. No.3. Jakarta, September.

Alkadri dan Djajadiningrat, 2002. Tiga Pilar Pembangunan Wilayah, Penerbit BPPT Jakarta.

- Arsyad L. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPPE Yogyakarta., 1997, Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Asnawi J. 2008. Sektor unggulan perekonomian Riau. *Jurnal Teroka Riau*. 8:104-107.
- Aziz, J.I. 1994. Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bachrul Elmi, 2004. Studi Pembiayaan Pembangunan Perkotaan (*urban development finance*) Kota Prabumulih, Kajian Ekonomi dan Keuangan., Vol.8, No.1. Maret.
- Badan Pusat Statistik, 2011. Rokan Hulu Dalam Angka
- Badan Pusat Statistik, 2012. Rokan Hulu Dalam Angka
- Bendavid-Val., Avrom, 1991. *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners, Fourth edition*, New York: Prager Publisher.
- Bintarto.R., 1991. Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Boediono, 1985. Teori Pertumbuhan Ekonomi., Yogyakarta, BPFE-UGM.
- David, F. R. 2006. Manajemen Strategis : Konsep Edisi Sepuluh. Jakarta : Salemba Empat.
- Daryanto A. 2003. Disparitas pembangunan perkotaan-perdesaan di Indonesia. Agrimedia.
- Daryanto A dan Hafizrianda Y. 2010. *Analysis Input-Output & Social Accounting Matrix* untuk Pembangunan Ekonomi Daerah. Bogor: IPB Press.
- Farulian Y. 2010. Analisis sektor unggulan perekonomian Nusa tenggara timur: analisis tingkat efisiensi dan ketergantungan antar sektor. [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Gunawan, Ikhsan.2014.Analisis Strategi Pengembangan Komoditas Unggulan Pertanian Di Kabupaten Rokan Hulu. Tesis Universitas Islam Riau.
- Glasson J. 1977. Pengantar Perencanaan Regional (Bagian Satu dan Dua).Terjemahan [Penerjemah]. Sitohang, P. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Terjemahan dari: *An Introduction to Regional Planning*.1990. Pengenalan Perancangan Wilayah Konsep dan Amalan (alih bahasa Ahris Yaakup). Dewan bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia Kualalumpur.
- Handewi Rachman. 2003. Penentuan Komoditas Unggulan Nasional di Tingkat Provinsi. Makalah Lokakarya ‘Sintesis Komoditas Unggulan Nasional’. Bogor.
- Hendayana, R. 2003. Aplikasi metode location quotient (LQ) dalam penentuan komoditas unggulan nasional. *Informatika Pertanian* 12 (2003): 1-21.

- Hermawan, R. 2008. Membangun Sistem Agribisnis. Agroinfo. Yogyakarta
- Hirschman AO. 1958. Strategi Pembangunan Ekonomi. Terjemahan. Sitohang P, [Penerjemah]. Djakarta: PT. Dian Rakjat. Terjemahan dari: *The Strategy of Economic Development*.
- Hoover., E.M., 1977. *An Introduction to Regional Economics*. (1st ed.). New York: Alfred A.Knopf, Inc.
- Indahsari, K. 2001. Penentuan Prioritas Pembangunan Berdasarkan Tingkat Perkembangan Kecamatan dan Potensi Wilayah. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Irawan Suparmoko, 1981, Ekonomi Pembangunan, BPFE, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajat dan Hairul Aswandi. 2002. *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan: Studi Empiris Di Kalimantan Selatan 1993-1999*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol 17, Nomor 1, Tahun 2002 : 27-45, BPFE, Yogyakarta
- Kustanto H. 1999. Sistem Pengembangan Komoditas Unggulan Pada Kawasan Unggulan: Studi Kasus Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. [Tesis]. Bogor: Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Mira Yulianti, 2011. Penentuan Prioritas Komoditas Unggulan Buah-Buahan di Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara: Aplikasi Analisis LQ dan Daya Tarik-Daya Saing. Fakultas Pertanian Unlam
- Miradini SD. 2010. Analisis Perencanaan Pembangunan Agroindustri Provinsi Jawa Timur; Pendekatan Sektoral dan Regional. [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Mudrajat Kuncoro, 2000, Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Akademi Peremajaan Perusahaan, YKPN, Yogyakarta, 2003. Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Klaster Industri Indonesia. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Nur Indah Wulandari, 2010. Penentuan Agribisnis Unggulan Komoditi Pertanian Berdasarkan Nilai Produksi Di Kabupaten Grobogan. (Tesis). Program Studi Magister Agribisnis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang
- Prasetyo Soepono, 2001. Teori Pertumbuhan Berbasis Ekonomi (ekspor) Posisi dan Sumbangannya bagi Perbendaharaan Alat-alat Analisis Regional. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol.16 No.1.
- Rahardjo Adisasmita, 2005. Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rangkuti F. 2001. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis: Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Richardson Harry.,W. 1977. Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional. (terjemahan: Paul Sitohang). LPFE-UI. Jakarta.

Rokan Hulu Dalam Angka dalam beberapa tahun

Rustiadi E, Saefulhakim S, dan Panuju RD. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta. Crestpten Press dan Yayasan Obor Indonesia.

Sadono Sukirno, 2002, *Pengantar Teori Makro ekonomi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sihotang, Paul. 1991. *Dasar-dasar Ilmu Regional*, Jakarta, LPFE-UI.

Soeparmoko, 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi pertama. Andi. Yogyakarta.

Sudaryanto dan Syafa'at. N. 2002. *Kebijaksanaan Pembangunan Pertanian wilayah*. Dalam Analisis Kebijakan: Paradigma Pembangunan dan Kebijakan Pengembangan Agro Industri. Monograph Series No. 22. Penyunting : T. Sudaryanto, I.W. Rusastra, A. Syam dan M. Ariani. p: 1-8.

Sukatendel F. 2007. *Analisis Keterkaitan Alokasi Anggaran dan Sektor Unggulan dalam Mengoptimalkan Kinerja Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bogor*. [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Sukanto R dan Karseno, 1997. *Ekonomi Perkotaan*. BPFE UGM Yogyakarta.

Sumiati, Uum. 2009. *Strategi Pengembangan Usaha Bawang Merah Goreng PO Mekar Wangi Desa Taraju, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan*. [skripsi]. Bogor : Fakultas Ekonomi Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Suryanto. B. 2004. *Peran Usahatani TernakRuminansia Dalam Pembangunan Agribisnis Berwawasan Lingkungan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Diponegoro. Semarang.

Syafrizal, 1993. *Ekonomi Regional : Suatu Perkembangan dalam Ilmu Ekonomi*. Ekonomi Keuangan Indonesia. Vol.XXXI.No.2, Jakarta, Juni.

Syarifudin I. 2003. *Studi pemilihan subsektor jasa unggulan dalam rangka mendukung Kota Bandung sebagai kota jasa*. [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Tarigan, R. 2005. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. PT.Bumi Aksara, Jakarta.

Todaro MP, 2000. *Economic Development* (7th ed.) New York; Addition Wesley Longman, Inc., 1997. *Economic Development in the Third World*. 6th Edition. London: Longman.

Umar, H.2008. *Strategic Management in Action*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.

Undang – Undang nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 22 Dan Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

RPJM Rokan Hulu, 2013. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu.

Wibowo, S. 2008. Pedoman Mengelola Perusahaan Kecil. Penebar Swadaya. Jakarta.

Wiludjeng Roessali. 2015. Sumber Daya Manusia Dalam Mendukung Pertanian Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional Agribisnis III. ISBN: 978-979-097-398-5. Hal: 16